

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran SK Pembimbing



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021
Program Studi :
Akutansi Paripakai Program Sarjana Terapan - Akutansi Limbaga Keagamaan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Pemasaran Visual dan Kota Program Sarjana - Agribisnis Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
Gawaikehidupan Program Sarjana - Pendidikan Keperawatan Caring Program Sarjana

Jl. Kembang Sali Al-Aitaam No.1 Cipinang Jaya, 022-8791-0231 Bandung Kabupaten Bandung

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM - SI

FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu penyelesaian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Hukum - SI Universitas Sali Al-Aitaam, dirasa perlu menetapkan dan mengangkat Dosen Pembimbing;

2. Bahwa monev yang Namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Hukum - SI Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam;

3. Bahwa untuk keperluan administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa Skripsi untuk Program Studi Hukum - SI Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;

3. Anggaran Dasar Yayasan Agung Al-Sali seperti tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan Agung Al-Sali Nomor 1/2012 tanggal 19 September 2013 dan Akta Perubahan Yayasan Agung Al-Sali Nomor 1/2018 tanggal 19 September 2018 dan Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2018;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021;

5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021;

6. SK Pengangkatan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Periode 2021-2026 Nomor 085/SK-STRUKTURAL/YAAS/PENGURUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021;

7. Statuta Universitas Sali Al-Aitaam.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Fakultas Hukum perihal Permohonan Pembantuan Surat Tugas Pembimbing Skripsi dan Penunjukan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum - SI Fakultas Hukum untuk periode Tahun Akademik 2025/2026

Kedua : Bahwa Dosen Pembimbing memiliki tugas sebagai berikut :

a. Memberikan arahan dan atau masukan dalam pelaksanaan penyusunan dan penyelesaian Skripsi;

b. Membimbing Mahasiswa dalam penulisan laporan Skripsi;

c. Melaporkan perkembangan kegiatan bimbingan bimbingan kepada Fakultas dan Prodi;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekurangan dan atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor, Universitas Sali Al-Aitaam,
Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor, Universitas Sali Al-Aitaam,
Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

Lampiran SK Rektor
Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025
Perihal : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Program Studi Hukum - SI Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM - SI FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No	Nama Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	NIM	Program Kekhususan
1	Dr. Henky Setihs MZ, S.H., M.H.	Siti Nurhasanah	2274201037	Hukum Perdata
		Ana Riana	2274201076	Hukum Perdata
		Maria Sopani	2274201022	Hukum Perdata
		Renzaldi Nugraha	2274201054	Hukum Perdata
		Saniagi Agung	2274201068	Hukum Perdata
2	Dr. Rina Kemeriah, S.H., M.Kk.	Yunisa Nurd Azmi	2274201034	Hukum Perdata
		Feri Pemasayah	2274201043	Hukum Pidana
		Romi Setiawan	2274201069	Hukum Pidana
		Tiell Hidayat	2274201078	Hukum Pidana
		Mahmud Ryan Panikeri	2274201064	Hukum Pidana
3	Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H., C.Med.	Murti J Ambarita	2274201062	Hukum Perdata
		Narti Sunarti	2274201006	Hukum Perdata
		Rafa Nurafifah	2274201008	Hukum Perdata
		Neng Putri Dimsyanti Singih	2274201027	Hukum Pidana
		Riki Saputra	2274201060	Hukum Perdata
4	Budiana S.H., M.H.	Rama Nur Ramdhan	2274201063	Hukum Pidana
		Setiawan Mubala	2274201038	Hukum Pidana
		Rin Kuswandi	2274201036	Hukum Perdata
		Rival Azhar Padillah	2274201077	Hukum Pidana
		Friski Afiz Nurahy	2274201020	Hukum Pidana
5	Budl Rahman, S.H., M.H.	Widan Zulfikar	2274201014	Hukum Pidana
		Wida Wida	2274201038	Hukum Pidana
		Dedy Sutarna	2274201018	Hukum Pidana
		Aan	2274201048	Hukum Pidana
		Arti Ai Firdi	2274201017	Hukum Perdata
6	KM Rnu Shina Zamudin, S.H., M.H.	Amelia Sofanti	2274201042	Hukum Pidana
		Al Rahmawati	2274201065	Hukum Pidana
7	Gith Afif Syih M., S.E., S.H., M.H.			

Teknis :
1. Yk. Kesa Pembina YAAS
2. Yk. Kesa Pembina YAAS
3. Yk. Kesa Pembina YAAS
4. Yk. Kesa Pembina YAAS
5. Peringat

Lampiran 2. Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :
 Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
 Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
 Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
 Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
 Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No. 1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

Form. 3

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama : Aus
 NIM : 2294201048
 Program Studi : Hukum
 Judul Skripsi : Analisis yuridis mengenai sistem Penerapan sistem Pendidikan Pidana Anak
 Pembimbing : Bp. Km Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H

No.	Tanggal	Materi / Saran / Perbaikan	Paraf Pembimbing
1	1 - 12 - 2025	ACC proposal setelah Perbaikan	
2	22 - 12 - 2025	Perbaikan substansi dan isi BAB 1	
3	12 - 01 - 2026	Perbaikan substansi, sistematika, Daftar Pustaka	
4	2 - 02 - 2026	Perbaikan substansi BAB II	
5	23 - 02 - 2026	Perbaikan substansi dan sistematika penulisan	
6	09 - 03 - 2026	Perbaikan substansi BAB III dan isi materi	
7	12 - 03 - 2026	Perbaikan substansi BAB IV - lanjut BAB V	
8	6 - 04 - 2026	Finishing BAB IV - V <u>ACC Sitang /</u>	
1.	02-05-2026	Revisi proposal	
2	07-05-2026	Hubungan / verifikasi milih dengan teori	
3	16-05-2026	Sistematisasi penulisan	
4	20-05-2026	Revisi Bab II	
5	06-06-2026	Revisi II. penulisan.	

Catatan:
 1. Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan
 2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Pelaksanaan Ujian	Tanggal
Seminar Proposal	17 November 2025
Sidang Akhir Skripsi	
Yudisium Kelulusan	

Pembimbing 2 Kab. Bandung, .../20....
 Pembimbing,

KRI IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H., M.H.

Lampiran 3. Surat Keterangan Plagiasi



PERPUSTAKAAN SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :
Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kepelatihan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No : 009/Pust.UNISAL/PI/IV/2026

Perpustakaan Universitas Sali Al-Aitaam menyatakan bahwa naskah Karya Ilmiah,

Nama : Aas
NIM : 2274201048
Prodi : S1 Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN KASASI MA
No.535.k/Pid.sus/2025

Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara online menggunakan Turnitin Plagiarism Checker dengan similarity index $\leq 35\%$ dan dinyatakan **BEBAS** dari plagiasi (rincian hasil plagiasi terlampir).

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 April 2026
Ka. Bag Perpustakaan,



Yuyun Siti Khoeriyah, S.S.I

SKRIPSI AAS - FH.pdf

ORIGINALITY REPORT

34%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

28%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

Lampiran 4. Curriculum Vitae



A. Identitas Diri

Nama : Aas
NIM : 2274201048
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 26 April 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Ciwangi Rt 001/ Rw 004, Desa.Pinggirsari,
Kec.Arjasari, Kab.Bandung Jawa Barat
Agama : Islam
Nomor HP : 0838-1609-2552
Email : aaswidi173@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2010-2016 : SDN Babakan Siliwangi
Tahun 2016-2019 : MTs Al Huda Arjasari
Tahun 2019-2022 : SMA Al Huda Arjasari
Tahun 2022-2026 : Universitas Sali Al-Aitaam Bandung

C. Pengalaman Organisasi

- Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum Unisal
- Anggota Sahabat Saksi dan Korban (SSK) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jawa Barat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 535 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MARCEL HASUGIAN TAMBUNAN;**
Tempat Lahir : Padangsidimpuan;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/19 Desember 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Gg. Selayang-layang, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024;
Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-364 3348) (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum MARCEL HASUGIAN TAMBUNAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum MARCEL HASUGIAN TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan latihan kerja;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga keras berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruh 1,02 (satu koma nol dua) gram, berat bungkus 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 10/Pid.Sus Anak/2024/PN Psp tanggal 7 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan fakta atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum MARCEL HASUGIAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berkonflik dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Tapanuli Selatan yang beralamat di Jalan Ompu Raja Sori Siharangkang, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) jam per hari dan tidak dilakukan pada waktu libur dan waktu malam hari;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruh 1,02 (satu koma nol dua) gram, berat bungkus 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN tanggal 5 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 7 November 2024 Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psp atas nama Anak MARCEL HASUGIAN TAMBUNAN, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Anak yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid-Anak/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 16 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 19 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2025

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Anak sebagaimana dalam surat tuntutan karena pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan dan tidak memberikan efek jera bagi Anak;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi tersebut, putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan Pak Layan (DPO) sebagai orang yang didalilkan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Anak, dengan demikian dalil menerima Narkotika jenis sabu yang dilakukan Anak hanya merupakan pengakuan semata yang tidak didukung alat bukti lainnya yang sah;
 - Bahwa dengan demikian tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP untuk menyatakan terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Bahwa terang dan jelas saat dilakukan penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram berada dalam penguasaan Anak, dengan demikian tindak pidana yang terbukti dilakukan Anak adalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 - Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan telah terbukti unsur "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" dalam perbuatan Anak adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta hukum yang relevan di persidangan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN tanggal 5 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 10/Pid.Sus Anak/2024/PN Psp tanggal 7 November 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Anak dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada skema ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN tanggal 5 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 10/Pid.Sus Anak/2024/PN Psp tanggal 7 November 2024 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Anak dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak **MARCEL HASUGIAN TAMBUNAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Anak **MARCEL HASUGIAN TAMBUNAN** tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Anak **MARCEL HASUGIAN TAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di UPTD Balai Latihan Kerja Tapanuli Selatan yang beralamat di Jalan Ompu Raja Sori Siharangkarang, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) jam per hari dan tidak dilakukan pada waktu libur dan waktu malam hari;
 5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 3 Februari 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Hamsurah, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8